TEMPO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nafsu Besar Tenaga Ambyar

Traget traget dunaikan untuk memenuhi usulan Dewan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta memberi rapor merah terhadap laporan pertanggungjawaban kerja Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2014. Dalam sidang paripurna, Kamis pekan lalu, Dewan menganggap Basuki tak mampu menggerakkan birokratnya memenuhi target-target belanja pembangunan tahun lalu sehingga kinerjanya buruk.

Basuki tak memungkiri penilaian tersebut. Namun ia beralasan target tak tercapai akibat banyaknya usulan dan anggaran siluman yang diusulkan Dewan dalam pembahasan anggaran pada 2013. Misalnya, ia menyetop anggaran pembangunan sebesar Rp 9 triliun karena dianggapnya tak jelas. "Jadi saya ini berusaha menghemat pengeluaran uang negara," katanya.

Sebetulnya, tak hanya serapan belanja anggaran yang rendah. Di sektor pendapatan, pemerintah Jakarta juga gagal memenuhi target yang dibuatnya sendiri dan disetujui Dewan. Dari target Rp 65 triliun, realisasi penerimaan tahun lalu hanya tercapai 66 persen atau Rp 43,4 triliun.

Basuki mengakui target penerimaan sebesar itu terlalu tinggi karena lompatannya hampir dua kali lipat dari target penerimaan tahun sebelumnya yang dibuat pemerintah Jakarta semasa dipimpin Gubernur Fauzi Bowo. Anggaran 2013 yang disusun pada 2012 hanya menargetkan penerimaan Rp 41,5 triliun.

Lompatan target penerimaan itu, kata Basuki, lantaran pemerintah Jakarta waktu itu menghitung banyak potensi pajak yang belum bisa ditagih. Bersama Gubernur Joko Widodo waktu itu, ia menargetkan wajib pajak terkumpul sebanyak 10 ribu berasal dari restoran, hotel, dan tempat hiburan. "Waktu itu targetnya sampai Rp 100 triliun," kata Wiryatmoko, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta sebelum digeser ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Wiryatmoko menuturkan, ketika itu ia ditantang memenuhi target itu setelah dihitung potensi-potensi penerimaannya. "Saya bilang sanggup," kata dia. Kepala Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi juga menyatakan sanggup memenuhi target.

Penambahan 300 persen jumlah pembayar pajak itu diperkirakan mendongkrak pendapatan dengan cara penagihan sistem *online*. Nyatanya, pembayar pajak yang menyetor kewajibannya hanya terkumpul 4.000. "Gagal target karena ada alat yang mesti disediakan pembayar pajak supaya *online*, harganya Rp 7 juta," kata Iwan yang dicopot pada Januari lalu.

Karena bukan kewajibannya, kata Iwan, pembayar pajak menolak membeli alat tersebut. Di sisi lain, pemerintah Jakarta juga tak mau mengeluarkan anggaran untuk membelinya. "Arahannya waktu itu jangan keluar anggaran untuk mendongkrak pajak," kata dia. Iwan lalu menggandeng bank pemerintah untuk menggaet pajak itu. Tak terlalu berhasil.

Penyebab lain yang membuat target pendapatan pajak tak tercapai, kata Iwan, adalah tak mencukupinya jumlah penagih pajak. Jumlah penagih pajak hanya 800 orang, sedangkan targetnya dinaikkan 100 persen, sehingga petugas yang dibutuhkan sebanyak 1.500. "Kualitasnya juga tak mumpuni," kata staf di Asisten Gubernur Bidang Perekonomian ini.

Gubernur Basuki tak setuju terhadap alasan kualitas petugas pajak. Menurut dia, jumlah dan kemampuan petugas penagih pajak bukan tolok ukur keberhasilan mencapai target penerimaan. Soalnya, kata dia, di lapangan, pajak tak tertagih akibat kongkalikong antara petugas dan pembayar pajak. "Berapa banyak restoran enggak bayar pajak karena itu?" katanya. ● LINDA HAIRANI

IKLAN

TEMPO

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

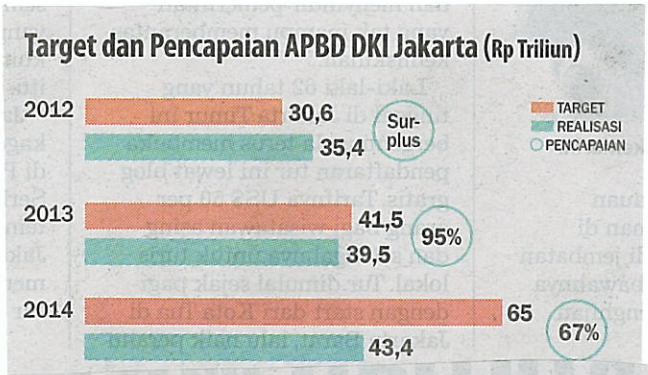

Tiga Penyebab Kegagalan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beralasan ada tiga penyebab pemerintahannya gagal memenuhi banyak target pendapatan dan belanja tahun lalu. Faktor-faktor itu dihitung di awal tahun anggaran banyak menyumbang pendapatan:

1. Jalan Berbayar

Pemerintah Jakarta batal menerapkan *electronic road pricing* atau sistem jalan berbayar. Seharusnya pungutan kepada pengendara yang masuk Jakarta ini berjalan pada April tahun lalu, tapi batal karena persiapannya kurang.

2. Diskon Pajak Reklame

Pemerintah Jakarta memberikan banyak diskon pada pajak pemasangan baliho. Selain itu, tarif pajak bumi dan bangunan mendapat diskon untuk memudahkan warga Jakarta mendirikan rumah dan bangunan.

3. Rendahnya Anggaran Perimbangan

Pemerintah Jakarta dialokasikan mendapat Rp 17,7 triliun dana perimbangan dari pemerintah pusat, tapi hanya terlaksana Rp 9,7 triliun. Angka sebesar itu dihitung dari banyaknya potensi penerimaan pajak pusat yang menjadi bagian pemerintah daerah.

● ERWAN HERMAWAN